

Model Komunikasi Media Alternatif untuk Pemberdayaan Perempuan Pascatambang Timah Bangka Belitung

Joko Mohamat Santoso *, Achmad Riyadi

Institut Pahlawan 12, Sungailiat, Indonesia

*jokomohamatsantoso@gmail.com

Artikel

Submitted: xx-xx-20xx

Reviewed: xx-xx-20xx

Accepted: xx-xx-20xx

Published: xx-xx-20xx

DOI:

10.32509/wacana.v25i1.6004



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Volume : 25

No. : 1

Bulan : Juni

Tahun : 2026

Halaman : 126-142

Abstract

This study aims to formulate a women's empowerment communication model in post-tin-mining environmental governance in Bangka Belitung, Indonesia. Women affected by ecological degradation caused by mining experience multiple vulnerabilities, including loss of economic access, increasing domestic burdens, and marginalization in environmental decision-making processes. This research employed a qualitative case study approach through in-depth interviews, field observations, and focus group discussions involving women tin panners, academics, environmental activists, and policymakers. Data were analyzed using grounded theory-based coding techniques, data reduction, and triangulation. The findings reveal that women's voices remain confined to private and informal community spaces due to patriarchal pressures and economic dependence on mining activities. The study identifies five main components of the women's empowerment communication model: community dialogue as a space for critical consciousness, community-based alternative media as an advocacy channel, gender-based digital literacy to strengthen communication capacity, data-based knowledge as a source of environmental advocacy legitimacy, and policy access through participatory village forums and regional planning mechanisms. The model demonstrates that communication functions as a strategic instrument to transform women from passive victims into active subjects in inclusive, gender-just, and sustainable environmental governance.

Keywords: communication model; women empowerment; alternative media; post-tin mining; Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Perempuan terdampak degradasi ekologi akibat pertambangan menghadapi kerentanan ganda berupa hilangnya akses ekonomi, meningkatnya beban domestik, dan marginalisasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan *focus group discussion* yang melibatkan perempuan pelimbang timah, akademisi, aktivis lingkungan, dan pembuat kebijakan. Analisis data dilakukan melalui teknik *coding* berbasis *grounded theory*, reduksi data, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara perempuan masih terbatas pada ruang privat dan komunitas informal akibat tekanan patriarki dan ketergantungan ekonomi terhadap tambang. Penelitian ini menemukan lima komponen utama model komunikasi pemberdayaan perempuan pascatambang, yaitu dialog komunitas sebagai ruang kesadaran kritis, media alternatif berbasis komunitas sebagai saluran advokasi, literasi digital berbasis gender untuk memperkuat kapasitas komunikasi, penguasaan pengetahuan berbasis data sebagai legitimasi advokasi lingkungan, dan akses kebijakan melalui forum partisipatif desa dan perencanaan daerah. Model ini menegaskan bahwa komunikasi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi perempuan dari objek terdampak menjadi subjek aktif dalam tata kelola lingkungan yang inklusif, adil gender, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: model komunikasi; pemberdayaan perempuan; media alternatif; pascatambang timah; Bangka Belitung

PENDAHULUAN

Sejak abad ke-4 hingga era kolonial, Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu sentra pertambangan timah penting di Nusantara (Anastasia, 2019). Provinsi ini sebagai penghasil timah terbesar kedua setelah Malaysia (Kurniawan et al., 2024), menghadapi dilema besar antara kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan dan dampak ekologis yang ditimbulkannya, baik saat operasi maupun pascatambang (Valensia et al., 2023). Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka tahun 2022 mencatat adanya 167.104 hektar lahan kritis dari total 1.668.933 hektar hutan dan lahan (Walhi.or.id, 2024). Kondisi ini memicu beragam kerusakan lingkungan, mulai dari penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat (Valensia et al., 2023).

Dalam situasi tersebut, perempuan yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga (Indrawasih, 2015). Perempuan dan lingkungan merupakan sebuah kombinasi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam (H. A. Sholihah et al., 2024). Namun dengan kondisi rusaknya lingkungan akibat tambang, justru Perempuan menghadapi kerentanan ganda yakni kehilangan akses ekonomi sekaligus peningkatan beban domestik. Kerentanan ini diperparah oleh sistem patriarki yang masih kuat dan membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Khadijah, 2023). Meskipun Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 26 tahun 2018 telah mendorong pelibatan perempuan dalam penyusunan AMDAL (Mongabay.co.id, 2022).

Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa perempuan terdampak tambang di Bangka Belitung lebih banyak menyampaikan keluhan lingkungan dalam ruang komunikasi informal antarperempuan dan belum memiliki akses yang memadai terhadap media maupun forum publik. Beberapa informan menyatakan bahwa pembicaraan mengenai dampak tambang hanya dilakukan “sesama ibu-ibu” dan tidak pernah sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya mengalami kerentanan ekologis, tetapi juga mengalami keterbatasan akses komunikasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Kondisi marjinalisasi perempuan dalam isu lingkungan pascatambang ini menegaskan perlunya ruang komunikasi baru yang mampu menghadirkan perspektif berbeda di luar arus utama. Dalam konteks tersebut, media alternatif hadir sebagai saluran yang berorientasi pada komunitas dan menekankan prinsip demokrasi komunikasi (Afriski et al., 2025), sekaligus membuka peluang terciptanya ruang partisipatif yang lebih egaliter dan berperspektif gender (Karasová, 2023), potensi media alternatif sebagai alat advokasi perempuan di Bangka Belitung hingga kini masih jarang mendapat perhatian dalam kajian akademik.

Keterbatasan kajian mengenai peran media alternatif dalam advokasi perempuan pascatambang membuka kebutuhan untuk melihat bagaimana praktik media ini telah dijalankan dalam konteks lain. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media alternatif memang memiliki kapasitas untuk menyoroti isu-isu sosial, lingkungan, dan relasi kuasa yang sering diabaikan media arus utama. Salah satu contoh yang menonjol adalah Project Multatuli, Media ini mengandalkan pendanaan donor, menerapkan prinsip *slow journalism*, bersifat transparan dalam sumber dana, serta beroperasi seperti LSM. Karakteristik ini menunjukkan potensinya sebagai alat advokasi sosial dan lingkungan (Afriski et al., 2025).

Lebih jauh, Project Multatuli juga dianalisis sebagai *watchdog* demokrasi yang independen dari cengkeraman oligarki media. Penelitian ini menunjukkan bahwa media alternatif memiliki peran penting dalam membongkar kerusakan lingkungan dan ketidakadilan struktural (Rizal & Bahri, 2024). Bahasa satir juga menjadi salah satu strategi yang digunakan media alternatif untuk mengkritik elit politik dan sekaligus memberdayakan kelompok marginal, sehingga berkontribusi dalam mendorong perlawanan kolektif (Wahid, 2024).

Dalam konteks lain, aktivisme digital menunjukkan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun solidaritas lingkungan melalui kampanye digital bersama *opinion leader*, menyoroti kontribusi media alternatif terhadap isu lingkungan (Hasna, 2025). Sebagai perbandingan,

Magdalene.co sebagai media feminis berhasil mengintegrasikan perspektif gender dan konten persuasif dalam kampanye digitalnya, menjadi contoh kuat bagaimana feminisme dapat diarusutamakan melalui media alternatif (Laksono & Zakiyah, 2023). Dalam pendekatan partisipatif, *WatchdoC Documentary* mengadopsi model *participatory democracy* dengan melibatkan narasumber dari kelompok yang terpinggirkan, memperlihatkan bagaimana media alternatif bisa dijalankan secara inklusif dan demokratis (Riyayanatasya, 2023).

Penelitian pascatambang jarang menempatkan perempuan sebagai subjek utama, kajian gender belum mengaitkannya dengan tata kelola lingkungan, dan studi media alternatif belum melihatnya sebagai ruang komunikasi partisipatif yang memberdayakan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* pada belum terintegrasinya ketiga isu tersebut, khususnya dalam konteks lokal Bangka Belitung. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menjelaskan bagaimana media alternatif dapat digunakan untuk membangun model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: “*Bagaimana media alternatif dapat membangun model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah?*”

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan komunikasi partisipatif yang dikembangkan oleh Servaes dan Freire (Odoom et al., 2024; Suzina et al., 2020), *empowerment theory* (Kabeer, 2021) serta *Feminist Political Ecology* yang dikembangkan Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari (Ty, 2023). Dalam kerangka konseptual penelitian ini, *Feminist Political Ecology* digunakan untuk menjelaskan struktur relasi kuasa, ketimpangan gender, dan ketergantungan ekonomi yang menyebabkan marjinalisasi perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang. Pendekatan komunikasi partisipatif Servaes dan Freire digunakan untuk memahami bagaimana dialog komunitas dan ruang komunikasi horizontal dapat membangun kesadaran kritis perempuan. Sementara itu, *empowerment theory* menjelaskan bagaimana akses terhadap media, pengetahuan, dan literasi digital dapat memperkuat *agency* perempuan sebagai aktor advokasi lingkungan. Integrasi ketiga perspektif tersebut digunakan untuk melihat media alternatif tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi sebagai ruang advokasi yang mentransformasi perempuan dari objek menjadi subjek dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Model tersebut diharapkan dapat memberikan implikasi bagi penguatan kebijakan komunikasi yang responsif gender serta menjadi rujukan pengembangan strategi pemberdayaan perempuan di wilayah pertambangan lain guna mendukung terwujudnya keadilan ekologis dan kesetaraan gender.

METODOLOGI

Paradigma penelitian ini adalah paradigma kritis–emansipatoris yang memandang realitas sosial sebagai hasil relasi kuasa dan ketimpangan struktural. Paradigma kritis menempatkan penelitian sebagai sarana membongkar dominasi sekaligus mendorong pemberdayaan dan perubahan sosial bagi kelompok marginal (Asghar, 2013). Dalam konteks penelitian ini, paradigma kritis digunakan untuk memahami bagaimana perempuan terdampak tambang mengalami marjinalisasi komunikasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang serta bagaimana media alternatif dapat menjadi ruang advokasi dan pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus advokasi lingkungan berbasis media alternatif. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan holistik dalam konteks nyata kehidupan masyarakat pascatambang timah di Bangka Belitung (Creswell, J. W., & Poth, 2024). Penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga “mengapa” media alternatif dapat berfungsi sebagai ruang komunikasi kritis bagi perempuan dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan kesetaraan gender.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman komunikasi perempuan terdampak tambang, pandangan akademisi dan aktivis, serta perspektif pemerintah terkait partisipasi perempuan dalam tata kelola lingkungan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung praktik komunikasi komunitas, kondisi sosial masyarakat pascatambang, dan penggunaan media alternatif di tingkat lokal. Sementara itu, FGD dilakukan untuk memperoleh dinamika diskusi kolektif antarpeserta terkait pengalaman ekologis, hambatan komunikasi, dan peluang pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengalaman, posisi sosial, dan keterlibatan mereka dalam isu lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Dari kelompok perempuan terdampak langsung aktivitas tambang timah, yaitu Ibu Zubaidah (pelimbang timah, Warga Pemali). Dari kalangan akademisi dan aktivis perempuan, terdapat Dr. Ferdiana, M.I.Kom, Sulista, ST., M.T. (peneliti ahli muda Bappeda), serta Widya Handini, B.Sc., M.Sc. (akademisi dan aktivis lingkungan Bangka Belitung) yang memberikan perspektif teoritis, kritis, dan advokatif. Sementara itu, dari unsur pemerintahan dan politik hadir Eko Sentosa, S.Mn., M.Si. (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Ismonohadi Yonoutomo, ST., MM. (Fungsional Perencana Muda Bappeda), serta Lisa Oktaviani, S.IP., M.AP. (akademisi sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan).

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Nama/Kategori Informan	Jenis Kelamin	Posisi/Profesi	Relevansi Penelitian
P1	Ibu Zubaidah	Perempuan	Pelimbang timah	Mengalami langsung dampak lingkungan pascatambang
P2	Ibu Lidia	Perempuan	Pedagang/Ibu rumah tangga	Perspektif komunikasi komunitas perempuan
A1	Dr. Ferdiana, M.I.Kom.	Perempuan	Dosen komunikasi	Perspektif komunikasi, gender, dan media
A2	Sulista, ST., M.T.	Perempuan	Peneliti Ahli Muda Bappeda Prov Bangka Belitung	Perspektif tata kelola lingkungan
A3	Widya Handini, B.Sc., M.Sc.	Perempuan	Akademisi dan aktivis lingkungan	Perspektif advokasi perempuan dan lingkungan
G1	Eko Sentosa, S.Mn., M.Si.	Laki-laki	Kepala Bidang Litbang Bappeda Prov Bangka Belitung	Perspektif kebijakan lingkungan
G2	Ismonohadi Yonoutomo, ST., MM.	Laki-laki	Fungsional Perencana Muda Bappeda Prov Bangka Belitung	Perspektif perencanaan pembangunan
P3	Lisa Oktaviani, S.IP., M.AP.	Perempuan	Anggota DPRD Bangka Selatan	Perspektif partisipasi perempuan dan kebijakan

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Selain wawancara mendalam, FGD juga menghadirkan peserta dari kalangan perempuan terdampak kerusakan lingkungan pascatambang, perangkat Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, serta akademisi untuk memperkuat triangulasi data dan memperkaya perspektif penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, peneliti menggunakan teknik *coding* berbasis *Grounded Theory* (Strauss, A., & Corbin, 1998) yang meliputi *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Dalam penelitian ini, *Grounded Theory* digunakan sebagai teknik analisis *coding* untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan data lapangan, bukan sebagai desain penelitian utama untuk membangun teori murni dari data. *Open*

coding digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dari kutipan wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, *axial coding* digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan makna ke dalam kategori yang lebih besar. Adapun *selective coding* digunakan untuk menemukan tema inti yang menjadi dasar perumusan model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, peneliti menggunakan teknik *coding* berbasis *Grounded Theory* (Strauss, A., & Corbin, 1998) yang meliputi *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Dalam penelitian ini, *Grounded Theory* digunakan sebagai teknik analisis *coding* untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan data lapangan, bukan sebagai desain penelitian utama untuk membangun teori murni dari data. *Open coding* digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dari kutipan wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, *axial coding* digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan makna ke dalam kategori yang lebih besar. Adapun *selective coding* digunakan untuk menemukan tema inti yang menjadi dasar perumusan model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Tabel 2. Proses Coding dalam Analisis Data

Kutipan Data	Open Code	Axial Category	Selective Category
"Biasanya kami ngobrol secara langsung dengan ibu-ibu lainnya. Kami tidak pernah menggunakan media lain." (P1)	Komunikasi informal antarperempuan	Keterbatasan akses komunikasi publik	Marjinalisasi suara perempuan
"Takut salah ngomong, takut diprotes, jadi lebih banyak diam saja." (P2)	Rasa takut berbicara	Hambatan psikologis partisipasi	Relasi kuasa patriarkis
"Kalau kami ini cari makan dari tambang sinilah. Susahlah kalau mau komen tentang lingkungan." (P1)	Ketergantungan ekonomi tambang	Dilema ekonomi dan advokasi	Struktur ketergantungan tambang
"Kalau perempuan diberi ruang diskusi yang aman, sebenarnya mereka mau bicara." (A3)	Ruang aman komunikasi	Potensi dialog partisipatif	Komunikasi dialogis perempuan
"Media sosial itu memberi ruang bagi perempuan untuk bercerita." (A3)	Media sosial sebagai ruang aman	Media alternatif partisipatif	Agency perempuan
"Kalau perempuan berbicara dengan dasar pengetahuan dan data, posisi mereka lebih kuat." (A1)	Pengetahuan sebagai legitimasi	Advokasi berbasis data	Penguatan <i>agency</i> perempuan
"Aspirasi akan lebih mudah masuk ke perencanaan kalau disampaikan dengan data." (G1)	Data sebagai dasar kebijakan	Pengetahuan dan akses kebijakan	Transformasi komunikasi ke kebijakan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Kedua, analisis data juga mengikuti model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi pokok agar lebih fokus pada isu komunikasi perempuan, media alternatif, dan tata kelola lingkungan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan model konseptual untuk memudahkan interpretasi temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi berulang terhadap data lapangan dan kerangka teori yang digunakan.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, FGD, dan dokumen pendukung guna memastikan kredibilitas, konsistensi, dan kekayaan data penelitian. Selain itu, proses interpretasi dilakukan secara reflektif

dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan relasi kuasa yang memengaruhi pengalaman komunikasi perempuan dalam lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marjinalisasi Suara Perempuan dalam Tata Kelola Lingkungan Pascatambang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara perempuan terdampak pertambangan timah masih dominan disampaikan dalam ruang-ruang komunikasi privat dan informal, terutama di antara sesama perempuan. Keluhan terkait dampak lingkungan umumnya dibicarakan dalam percakapan sehari-hari di tingkat komunitas kecil, tanpa melibatkan ruang publik atau forum formal yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut tercermin dari pengalaman perempuan di Desa Pemali dan Sungailiat. Ibu Ria Lestari, seorang ibu rumah tangga, menjelaskan bahwa komunikasi mengenai dampak lingkungan lebih sering berlangsung secara langsung dan terbatas di lingkaran antarperempuan. Ia menyatakan, *"Biasanya kami ngobrol secara langsung dengan ibu-ibu lainnya. Kami tidak pernah menggunakan media lain, apalagi media sosial atau yang lainnya."* (wawancara 3 Juli 2025). Pengalaman serupa disampaikan oleh Ibu Lidia, ibu rumah tangga sekaligus pedagang es, yang menuturkan bahwa keluhan tersebut hanya berhenti pada percakapan informal dan tidak pernah tersampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih luas. Ia mengatakan, *"Kalau kumpul sama ibu-ibu sambil jualan, kami sering ngobrol soal ini. Tapi ya cuma sebatas cerita saja, nggak pernah sampai ke orang-orang besar atau ke kantor."* (wawancara 14 Juli 2025).

Selain keterbatasan ruang komunikasi, perempuan juga menghadapi hambatan psikologis dan sosial ketika hendak menyuarkan aspirasi lingkungan. Rasa minder, takut disalahkan, serta kekhawatiran akan konflik sosial membuat perempuan cenderung menahan diri untuk tidak berbicara secara terbuka. Ibu Lidia menggambarkan kondisi tersebut dengan menyatakan, *"Kami ini ibu rumah tangga, pedagang kecil pula. Kadang kalau mau bicara, merasa minder. Kayak suara kami ini kecil saja."* (wawancara 14 Juli 2025). Kekhawatiran terhadap reaksi sosial juga diungkapkan oleh Ibu Ria Lestari, *"Kami takut kalau nanti ada yang komentar macam-macam, takut disalah-salahkan atau diprotes."* (wawancara 3 Juli 2025). Ketakutan ini membuat perempuan lebih memilih diam, sebagaimana kembali ditegaskan oleh Ibu Lidia, *"Takut salah ngomong, takut diprotes, takut dikira cari masalah, jadi lebih banyak diam saja."* (wawancara 14 Juli 2025).

Dalam konteks ini, sikap diam perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk apatisisme terhadap kerusakan lingkungan, melainkan sebagai strategi bertahan (*survival strategy*) dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang rapuh. Perempuan memilih membatasi suara mereka untuk menghindari konflik sosial, stigma komunitas, maupun risiko terganggunya sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada aktivitas tambang.

Situasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika perempuan juga berperan sebagai pelimbang timah yang menggantungkan penghidupan keluarga pada aktivitas pertambangan. Dalam kondisi ini, perempuan menghadapi dilema antara menyuarkan kerusakan lingkungan dan mempertahankan sumber nafkah utama keluarga. Ibu Zubaidah, seorang pelimbang timah di Desa Pemali, menyampaikan bahwa aktivitas tambang merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang dapat diandalkan. Ia mengungkapkan, *"Enggak lah bu, karena kan ini tempat kita cari makan, sudah dikasih izin sama pemiliknya sudah syukur."* (wawancara 14 Juli 2025). Hal ini kembali ditegaskan ketika ia mengatakan, *"Kalau kami ini cari makan dari tambang sinilah. Susahlah kalau mau komen tentang lingkungan."* (wawancara 14 Juli 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap tambang tidak hanya memengaruhi keberlanjutan penghidupan masyarakat, tetapi juga membentuk batas-batas keberanian perempuan dalam menyuarkan kritik terhadap kerusakan lingkungan di ruang publik. Ketika aktivitas tambang menjadi sumber ekonomi utama keluarga, perempuan cenderung memilih diam sebagai bentuk negosiasi sosial untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan relasi sosial komunitas.

Temuan lapangan tersebut diperkuat oleh pandangan akademisi dan pemangku kebijakan. Dr. Ferdiana, M.I.Kom., menyatakan bahwa perempuan, khususnya perempuan pelimbang timah, masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan. Ia menegaskan, *“Urusan lingkungan masih dianggap sebagai domain laki-laki atau pemerintah, padahal perempuan memiliki pengalaman langsung terhadap dampak ekologis, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.”* (wawancara 15 Juli 2025). Dari perspektif perencana kebijakan daerah, Eko Sentosa, S.Mn., M.Si., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menambahkan bahwa ketergantungan ekonomi keluarga terhadap tambang membuat perempuan berada dalam posisi dilematis ketika hendak bersuara. Ia menyatakan, *“Ketika ibu-ibu mencoba bersuara, mereka sering menghadapi dilema karena keluarga mereka sendiri menggantungkan hidup pada tambang.”* (wawancara 25 Juli 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Sulista, ST., M.T., Peneliti Ahli Muda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menyoroti adanya stigma sosial dan tekanan struktural terhadap perempuan pelimbang. Ia menjelaskan, *“Mayoritas masyarakat masih menggantungkan ekonomi pada sektor pelimbang timah. Ketika perempuan ingin bersuara soal kerusakan lingkungan, mereka secara tidak langsung dianggap mengancam sumber penghidupan keluarga.”* (wawancara 25 Juli 2025). Selain itu, faktor budaya patrilineal turut memperkuat kondisi tersebut. Eko Sentosa menambahkan bahwa, *“Faktor budaya patrilineal membuat perempuan kurang berani bersuara.”* (wawancara 25 Juli 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marjinalisasi suara perempuan dalam isu lingkungan pascatambang terbentuk dari keterbatasan ruang komunikasi, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta norma budaya yang membatasi partisipasi perempuan. Kondisi tersebut membuat suara perempuan lebih banyak berhenti pada ruang-ruang informal, meskipun mereka memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan yang kuat terkait dampak lingkungan pascatambang.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peluang untuk menumbuhkan keberanian perempuan secara bertahap. Keberanian tersebut tidak selalu bergantung pada kepemilikan posisi kekuasaan formal, melainkan dapat dibangun melalui proses pembiasaan dan dukungan lingkungan sosial. Hal ini ditegaskan oleh Lisa Oktaviani, S.IP., M.AP., anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang menyatakan, *“Keberanian untuk bersuara bisa dibangun dengan membiasakan diri, bukan semata karena memiliki kekuasaan.”* (wawancara 25 Juli 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ruang-ruang kecil dalam komunitas dapat menjadi titik awal bagi perempuan untuk membangun kepercayaan diri dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Temuan pada subbagian ini menunjukkan bahwa marjinalisasi suara perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang tidak hanya disebabkan oleh minimnya akses komunikasi publik, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan budaya patriarkis, ketergantungan ekonomi terhadap tambang, serta hambatan psikologis dalam menyampaikan aspirasi. Akibatnya, pengalaman ekologis perempuan lebih banyak berhenti pada ruang-ruang informal dan belum terhubung secara efektif dengan proses pengambilan keputusan lingkungan. Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa komunitas perempuan memiliki potensi sebagai ruang awal pembentukan keberanian dan kesadaran kritis untuk memperjuangkan isu lingkungan secara kolektif.

Keterbatasan dan Potensi Komunikasi Dialogis Partisipatif di Tingkat Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dialogis dan partisipatif di tingkat lokal telah berlangsung di kalangan perempuan terdampak pertambangan timah, namun masih terbatas pada ruang-ruang informal dan belum terhubung secara berkelanjutan dengan ruang publik yang lebih luas. Dialog antarperempuan umumnya muncul dalam interaksi sehari-hari, seperti saat bekerja, berjualan, atau berkumpul secara spontan, dan berfungsi sebagai sarana berbagi pengalaman serta keluhan terkait dampak lingkungan. Ibu Ria Lestari menjelaskan bahwa percakapan mengenai kondisi lingkungan terjadi secara alami, tetapi tidak difasilitasi dalam bentuk forum khusus. Ia menyampaikan, *“Kalau ngobrol ya ngobrol saja, sambil cerita-cerita. Tidak ada forum khusus atau tempat resmi untuk*

membahas soal lingkungan." (wawancara 3 Juli 2025). Pengalaman serupa diungkapkan oleh Ibu Lidia, yang menyatakan bahwa diskusi tentang dampak tambang sering muncul dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, namun tidak berlanjut menjadi pembahasan kolektif yang lebih terarah. Ia menuturkan, *"Kalau lagi kumpul sambil jualan, suka bahas soal air atau panas sekarang. Tapi habis itu ya sudah, tidak pernah dibawa ke mana-mana."* (wawancara 14 Juli 2025).

Meskipun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan adanya potensi komunikasi dialogis partisipatif yang cukup kuat di tingkat komunitas. Kedekatan sosial dan pengalaman bersama antarperempuan menciptakan ruang aman untuk saling mendengarkan dan membangun pemahaman bersama mengenai dampak lingkungan. Ibu Zubaidah, pelimbang timah di Desa Pemali, menyampaikan bahwa komunikasi antarperempuan berfungsi sebagai ruang saling menguatkan. Ia mengatakan, *"Kalau sesama pelimbang, kami saling cerita saja. Sama-sama tahu capeknya, tahu dampaknya."* (wawancara 14 Juli 2025).

Potensi tersebut juga diamati oleh akademisi dan aktivis lingkungan. Widya Handini, B.Sc., M.Sc., menyatakan bahwa perempuan sebenarnya memiliki kesiapan untuk terlibat dalam dialog yang lebih luas apabila tersedia ruang yang aman dan konsisten. Ia menjelaskan, *"Kalau perempuan diberi ruang diskusi yang aman, sebenarnya mereka mau bicara dan ceritanya detail. Masalahnya selama ini tidak ada ruang yang konsisten."* (wawancara 26 Juli 2025).

Dari perspektif perencanaan kebijakan, Ismonohadi Yonoutomo, ST., MM., menilai bahwa komunikasi di tingkat lokal bersifat horizontal dan cenderung berhenti di antara warga. Ia menyampaikan, *"Di masyarakat itu sebenarnya ada komunikasi, tapi lebih ke sesama warga saja. Tidak sampai ke level kebijakan."* (wawancara 25 Juli 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Eko Sentosa, S.Mn., M.Si., yang menegaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat, termasuk suara perempuan, tidak tersalurkan karena tidak adanya mekanisme penghubung antara dialog komunitas dan proses perencanaan formal. Ia menyatakan, *"Aspirasi masyarakat sering berhenti di tingkat bawah karena tidak ada jembatan komunikasi ke perencanaan."* (wawancara 25 Juli 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dialogis-partisipatif sebenarnya telah hadir dalam kehidupan sehari-hari perempuan terdampak tambang melalui relasi sosial komunitas yang erat. Akan tetapi, dialog tersebut masih bersifat informal, belum terlembagakan, dan belum memiliki mekanisme penghubung dengan ruang publik maupun proses kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, kedekatan sosial, pengalaman bersama, dan ruang aman antarperempuan menjadi modal penting dalam membangun komunikasi partisipatif yang lebih inklusif dan transformatif apabila didukung oleh fasilitasi, media, dan akses kelembagaan yang memadai.

Dalam konteks ini, diperlukan mekanisme jembatan komunikasi yang mampu menghubungkan dialog komunitas perempuan dengan pengambil kebijakan secara lebih sistematis. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan aktif perempuan dalam forum desa dan *musrenbang*, pembentukan komunitas perempuan berbasis lingkungan di tingkat lokal, pemanfaatan media lokal dan media sosial komunitas sebagai kanal advokasi, serta penyelenggaraan forum dialog rutin antara kelompok perempuan, pemerintah desa, dan lembaga perencanaan daerah. Kehadiran mekanisme ini penting agar pengalaman dan pengetahuan ekologis perempuan tidak berhenti sebagai percakapan informal di tingkat komunitas, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aspirasi kolektif yang masuk ke dalam proses perencanaan dan kebijakan lingkungan.

Media Alternatif dan Penguasaan Pengetahuan sebagai Sumber Agency Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media alternatif dan penguasaan pengetahuan mulai dipahami sebagai sumber penting bagi perempuan untuk membangun *agency* dalam advokasi lingkungan pascatambang. Meskipun akses perempuan terhadap media formal masih terbatas, berbagai ruang non-arus utama seperti media sosial, forum akademik, diskusi komunitas, dan kegiatan advokasi berbasis pengetahuan mulai membuka peluang baru bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman dan kepentingannya. Dalam konteks penelitian ini, media alternatif tidak hanya dimaknai sebagai media sosial secara umum, tetapi mencakup media komunitas berbasis warga, media sosial

komunitas perempuan, kanal advokasi lingkungan, dokumentasi partisipatif berupa foto dan video pendek, forum diskusi komunitas, hingga platform digital lokal yang memungkinkan perempuan menyampaikan pengalaman ekologis mereka secara lebih mandiri dan partisipatif. Bentuk-bentuk media alternatif tersebut menjadi ruang komunikasi yang relatif lebih fleksibel dibandingkan media arus utama yang selama ini kurang memberi ruang terhadap pengalaman perempuan terdampak tambang.

Sejumlah informan menyampaikan bahwa media sosial menjadi saluran yang relatif aman dan fleksibel bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko konflik sosial. Widya Handini, B.Sc., M.Sc., akademisi sekaligus aktivis lingkungan, menyatakan bahwa media alternatif memungkinkan perempuan untuk berbicara dengan cara yang lebih personal dan kontekstual. Ia menjelaskan, *"Media sosial itu memberi ruang bagi perempuan untuk bercerita dari pengalaman mereka sendiri. Tidak harus formal, tapi pesannya bisa sampai dan dibaca banyak orang."* (wawancara 25 Juli 2025).

Potensi media alternatif ini juga terlihat dari upaya melibatkan perempuan sebagai produsen konten, bukan sekadar penerima informasi. Dalam beberapa kegiatan diskusi dan kampanye lingkungan, perempuan didorong untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri melalui tulisan, foto, atau video singkat. Lisa Oktaviani, S.IP., M.AP., anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, menilai bahwa pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan diri perempuan. Ia menyampaikan, *"Kalau perempuan dilibatkan sebagai pencerita, bukan hanya pendengar, mereka lebih berani menyampaikan pendapatnya."* (wawancara 25 Juli 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa media alternatif berkontribusi dalam membangun agency perempuan melalui beberapa indikator penting, yaitu meningkatnya keberanian perempuan untuk berbicara di ruang publik, kemampuan memproduksi narasi tentang pengalaman ekologis mereka sendiri, keterlibatan dalam forum diskusi dan advokasi lingkungan, akses terhadap data dan pengetahuan lingkungan, serta meningkatnya kemampuan perempuan dalam memengaruhi wacana dan proses kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Selain media sosial, penguasaan pengetahuan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi perempuan di ruang publik. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang terlibat dalam diskusi akademik, seminar, atau forum berbasis data cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menyuarakan aspirasi lingkungan. Dr. Ferdiana, M.I.Kom., menyatakan bahwa pengetahuan berfungsi sebagai legitimasi sosial bagi perempuan. Ia menjelaskan, *"Ketika perempuan berbicara dengan dasar pengetahuan dan data, posisi mereka menjadi lebih kuat dan tidak mudah dipatahkan."* (wawancara 15 Juli 2025).

Dari perspektif kebijakan, Eko Sentosa, S.Mn., M.Si., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menekankan bahwa penguasaan pengetahuan menjadi prasyarat agar aspirasi perempuan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan. Ia menyatakan, *"Aspirasi akan lebih mudah masuk ke perencanaan kalau disampaikan dengan data dan pemahaman yang jelas."* (wawancara 25 Juli 2025). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pengetahuan dan data tidak hanya memperkuat kapasitas komunikasi perempuan, tetapi juga meningkatkan legitimasi politik aspirasi mereka dalam ruang kebijakan formal.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua perempuan memiliki akses yang setara terhadap media dan pengetahuan. Keterbatasan literasi digital, waktu, serta sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan media alternatif secara berkelanjutan. Ismonohadi Yonoutomo, ST., MM., perencana muda di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjelaskan bahwa tanpa pendampingan yang memadai, upaya penguatan kapasitas perempuan cenderung terhenti di tahap awal. Ia menyampaikan, *"Kalau tidak ada pendampingan, perempuan sering berhenti di awal. Media dan pengetahuan itu butuh proses belajar."* (wawancara 25 Juli 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media alternatif dan penguasaan pengetahuan memiliki peran strategis dalam memperkuat *agency* perempuan dalam advokasi lingkungan pascatambang. Media alternatif menyediakan ruang komunikasi yang lebih aman, fleksibel, dan partisipatif bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman ekologisnya, sementara penguasaan pengetahuan

berbasis data memberikan legitimasi sosial dan politik terhadap aspirasi perempuan. Meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan literasi digital, pendampingan, dan akses sumber daya, kombinasi media alternatif dan pengetahuan menunjukkan potensi penting dalam mendorong transformasi perempuan dari objek terdampak menjadi subjek aktif dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan menafsirkan temuan penelitian dengan mengaitkannya secara sistematis pada tiga kerangka teoretis utama, yaitu komunikasi partisipatif Servaes dan Freire, *empowerment theory* Kabeer, serta *Feminist Political Ecology* (FPE). Integrasi ketiga perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa suara perempuan terdampak tambang masih termarginalisasi, bagaimana komunikasi berlangsung dalam konteks lokal, serta bagaimana komunikasi dapat dirumuskan sebagai model pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Marjinalisasi Suara Perempuan dalam Perspektif *Feminist Political Ecology*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan suara perempuan dalam isu lingkungan pascatambang merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif *Feminist Political Ecology*, struktur gender secara sistematis membentuk dominasi aktor laki-laki dan institusi formal dalam akses, kontrol, dan pengambilan keputusan lingkungan. Struktur ini tidak hanya membatasi partisipasi perempuan, tetapi juga secara aktif meminggirkan pengalaman dan pengetahuan ekologis mereka dari arena tata kelola dan kebijakan lingkungan (Ty, 2023).

Ketimpangan relasi kuasa tersebut tidak hanya terlihat dalam kebijakan atau struktur formal, tetapi juga hadir dalam keseharian perempuan. Ketergantungan ekonomi pada pertambangan timah membuat perempuan harus menimbang dengan hati-hati setiap suara yang ingin disampaikan, karena berbicara tentang kerusakan lingkungan berarti berhadapan dengan risiko ekonomi dan sosial yang nyata. Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap aktivitas pertambangan timah menempatkan mereka dalam posisi dilematis ketika hendak menyuarkan kerusakan lingkungan. Situasi ini memperkuat argumen FPE bahwa pengalaman ekologis Perempuan yang bersumber dari peran domestik, kesehatan keluarga, dan keberlanjutan penghidupan sering kali tidak diakui sebagai pengetahuan yang sah (*legitimate knowledge*) dalam proses pengambilan keputusan lingkungan (*Feminist Political Ecology*). Dalam konteks ini, budaya patriarki dan stigma sosial berfungsi sebagai mekanisme kuasa yang membungkam perempuan, sehingga sikap diam bukan merupakan bentuk apatisme, melainkan strategi bertahan dalam relasi sosial dan ekonomi yang rapuh (Kholisoh, 2015; Kurniawati, 2022).

Hal inilah yang menyebabkan marjinalisasi suara perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang tidak bersifat alami atau individual, tetapi merupakan hasil dari struktur politik-ekonomi, relasi gender, dan norma budaya yang membatasi pilihan serta keberanian perempuan. Namun, sejalan dengan kerangka FPE, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman ekologis sehari-hari justru menjadi sumber kesadaran kritis (*critical ecological consciousness*) yang potensial bagi perempuan untuk terlibat dalam advokasi lingkungan (H. A. Sholihah et al., 2024). Kesadaran ini dapat berkembang menjadi kekuatan politik ketika perempuan memperoleh ruang komunikasi yang aman dan pengakuan struktural, sehingga mereka tidak hanya diposisikan sebagai korban degradasi lingkungan, tetapi sebagai aktor strategis dalam tata kelola lingkungan berbasis keadilan gender.

Adapun temuan ini memperluas kajian FPE dengan menunjukkan bahwa dalam konteks pascatambang, ketergantungan ekonomi pada sumber daya ekstraktif menjadi mekanisme kunci yang mereproduksi pembungkaman suara perempuan.

Keterbatasan Komunikasi Dialogis dalam Kerangka Servaes dan Freire

Dalam kerangka komunikasi partisipatif, Servaes dan Freire memandang komunikasi sebagai proses dialogis yang bersifat horizontal, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar penerima informasi. Dialog dipahami sebagai prasyarat utama bagi terbentuknya kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan tindakan kolektif yang bersifat emansipatoris (Odoom et al., 2024; Suzina et al., 2020). Dalam perspektif ini, komunikasi tidak berhenti pada pertukaran pesan, tetapi diarahkan untuk membuka ruang refleksi bersama atas ketimpangan struktural dan relasi kuasa yang dialami masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi dialogis telah berlangsung di kalangan perempuan terdampak tambang melalui interaksi keseharian dan relasi komunitas yang erat. Dialog tersebut berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman, keluhan, serta penguatan emosional antarperempuan. Namun, dalam perspektif pemikiran Paulo Freire, dialog semacam ini masih berada pada tahap awal, yakni dialog yang memperkuat relasi sosial dan kesadaran bersama, tetapi belum sepenuhnya mendorong perubahan struktur sosial yang lebih luas. Freire menekankan bahwa dialog yang bersifat membebaskan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis yang terhubung dengan tindakan kolektif agar mampu menantang dan mengubah relasi kuasa yang timpang.

Argumen tersebut dipertegas oleh (Tufte, 2020) yang mengkritik praktik komunikasi partisipatif yang berhenti pada level prosedural dan simbolik. Menurut Tufte, dialog komunitas yang tidak disertai dengan penguatan kesadaran kritis serta akses terhadap arena tindakan kolektif berisiko terjebak sebagai partisipasi simbolik, yakni partisipasi yang tampak inklusif tetapi tidak menghasilkan perubahan struktural yang bermakna. Dalam konteks penelitian ini, dialog antarperempuan yang masih terbatas pada ruang komunitas lokal menunjukkan kondisi tersebut, di mana komunikasi telah membangun solidaritas sosial, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang.

Keterbatasan ini terlihat dari fakta bahwa dialog perempuan masih terkurung dalam ruang privat dan komunitas kecil, serta belum terhubung dengan ruang publik maupun mekanisme pengambilan keputusan. Menurut Freire, dialog yang bersifat membebaskan harus terhubung dengan praksis sosial dan struktur kekuasaan; refleksi yang tidak disertai tindakan kolektif berisiko jatuh pada apa yang ia sebut sebagai verbalism, yakni refleksi kritis yang tidak menghasilkan transformasi struktural. Gagasan ini kemudian dikembangkan dalam kajian komunikasi partisipatif kontemporer yang menekankan pentingnya menghubungkan dialog komunitas dengan arena kebijakan dan perubahan sosial (Odoom et al., 2024; Tufte, 2020).

Dalam kerangka Servaes, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif belum sepenuhnya berfungsi sebagai *people-centered communication* yang menghubungkan pengalaman lokal dengan wacana kebijakan yang lebih luas (*Communication for Development and Social Change*). Aspirasi dan pengalaman perempuan memang dibicarakan di tingkat komunitas, tetapi tidak memiliki saluran institusional yang memungkinkan dialog tersebut memengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan lingkungan (Suzina et al., 2020).

Situasi ini menggambarkan limit situation menurut Freire, yakni kondisi yang membatasi kemampuan kelompok marginal untuk mengubah kesadaran menjadi aksi kolektif yang berdampak politik (*Pedagogy of the Oppressed*) (Odoom et al., 2024; Tufte, 2020). Meskipun komunikasi dialogis telah diterapkan sebagai praktik sosial, ia belum berkembang menjadi alat perubahan struktural karena kurangnya dukungan media, pengetahuan, dan mekanisme kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif harus dirancang sebagai proses berjenjang yang menghubungkan dialog lokal dengan ruang publik dan kebijakan. Menurut Servaes, komunikasi partisipatif yang efektif membutuhkan jembatan antara pengalaman warga, media, dan pengambil keputusan agar dialog menjadi sarana transformasi sosial dan lingkungan, bukan sekadar ruang berbagi.

Media Alternatif, Pengetahuan, dan Agency dalam Perspektif *Empowerment Theory*

Dalam kerangka *empowerment theory*, Naila Kabeer memaknai pemberdayaan sebagai proses perluasan kemampuan individu untuk membuat pilihan strategis dalam konteks di mana kemampuan tersebut sebelumnya dibatasi. Proses ini terjadi melalui interaksi tiga dimensi utama, yakni sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan pencapaian (*achievements*) (Kabeer, 2021). Dalam perspektif ini, keterbatasan partisipasi perempuan tidak dilihat sebagai persoalan motivasi individu, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial, simbolik, dan politik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap media, literasi digital, dan pengetahuan berbasis data secara langsung membatasi *agency* mereka dalam advokasi lingkungan pascatambang. Ketika perempuan tidak memiliki sumber daya komunikasi yang memadai, kemampuan mereka untuk menyuarakan kepentingan, memengaruhi keputusan, dan menegosiasikan posisi dalam ruang publik menjadi sangat terbatas. Kondisi ini sejalan dengan argumen Kabeer bahwa *agency* tidak dapat muncul secara otonom tanpa dukungan sumber daya yang memungkinkan perempuan mengartikulasikan pilihan dan kepentingannya secara efektif (Kabeer, 2021).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ketika perempuan memperoleh akses terhadap media alternatif, forum akademik, dan pengetahuan berbasis data, terjadi pergeseran posisi yang signifikan. Media alternatif berfungsi sebagai ruang komunikasi yang relatif aman dan fleksibel, memungkinkan perempuan menyampaikan pengalaman ekologis dan kegelisahan sosial tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko konflik terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang aktivisme digital yang menunjukkan bahwa media sosial kerap dipakai sebagai *safe space* bagi perempuan untuk mengekspresikan diri, membangun dukungan, dan menyusun kontra-narasi, terutama ketika ruang offline berisiko memunculkan stigma atau konflik langsung (Mendes et al., 2019; Tufte, 2020). Dalam konteks Indonesia, ruang-ruang digital dalam gerakan feminis juga dilaporkan berfungsi sebagai medium yang relatif aman untuk berbicara dan berjejaring, sehingga memungkinkan artikulasi isu-isu yang sulit disampaikan secara terbuka di ruang sosial sehari-hari (Parahita, 2021; Paramaditha & Riyanto, 2020). Pada isu lingkungan, diskursus *ecofeminisme* di media sosial memperlihatkan bagaimana advokasi lingkungan dan pemberdayaan perempuan bertemu dalam praktik komunikasi digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses (Resurrección, 2017; R. Sholihah et al., 2024). Pada titik ini, peran media alternatif tidak hanya dapat dipahami sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai kondisi awal yang memungkinkan terjadinya pergeseran posisi perempuan dalam advokasi lingkungan. Untuk menjelaskan bagaimana ruang komunikasi tersebut bertransformasi menjadi kapasitas bertindak, temuan ini selanjutnya dibaca melalui kerangka *empowerment theory*.

Penguasaan pengetahuan berbasis data juga berperan penting dalam memperkuat *agency* perempuan. Pengetahuan memberikan legitimasi sosial dan politik yang memungkinkan suara perempuan diakui dalam diskursus publik dan kebijakan. Dalam kerangka Kabeer, kondisi ini menandai pergeseran perempuan dari posisi sebagai penerima dampak (*passive recipients*) menjadi aktor yang mampu menentukan arah perubahan (*agents of change*) (Kabeer, 2021). Dengan kata lain, pengetahuan berfungsi sebagai modal yang mengubah pengalaman personal menjadi argumen yang sah dalam arena kebijakan.

Media dan pengetahuan tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis, melainkan sebagai sumber daya strategis untuk memperluas *agency* perempuan. Namun, tanpa literasi digital, pendampingan berkelanjutan, dan akses kelembagaan, *agency* tersebut cenderung sporadis dan rapuh. Hal ini menegaskan pandangan Kabeer bahwa pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang menuntut perubahan struktural. Dengan demikian, media alternatif dan pengetahuan merupakan prasyarat struktural bagi terbentuknya *agency* perempuan, bukan sekadar sarana ekspresi individual.

Integrasi Teoretis dan Perumusan Model Komunikasi Pemberdayaan Perempuan

Integrasi antara komunikasi partisipatif, *empowerment theory*, dan *Feminist Political Ecology* memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika komunikasi perempuan

dalam konteks lingkungan pascatambang. Dalam kerangka komunikasi partisipatif, dialog dipahami sebagai proses horizontal yang menempatkan masyarakat termasuk Perempuan sebagai subjek aktif dalam pembentukan kesadaran kritis dan tindakan kolektif (*Pedagogy of the Oppressed; Communication for Development and Social Change*). Perspektif ini menjelaskan bagaimana dialog komunitas perempuan menjadi fondasi awal artikulasi pengalaman ekologis, meskipun belum sepenuhnya terhubung dengan arena kebijakan.

Sementara itu, *empowerment theory* menegaskan bahwa dialog hanya akan menghasilkan perubahan ketika didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memungkinkan perluasan *agency* perempuan. Dalam pandangan Naila Kabeer, pemberdayaan merupakan proses interaksi antara *resources*, *agency*, dan *achievements*, di mana akses terhadap media, pengetahuan, dan literasi digital menjadi prasyarat penting agar perempuan mampu mengubah pengalaman personal menjadi pilihan strategis yang berdampak (Kabeer, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa media alternatif dan penguasaan pengetahuan berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang memperkuat posisi perempuan dalam diskursus publik dan advokasi lingkungan.

Lebih lanjut, *Feminist Political Ecology* memberikan penjelasan kontekstual mengenai relasi kuasa yang membatasi sekaligus membentuk peluang transformasi. FPE menyoroti bahwa marginalisasi suara perempuan dalam tata kelola lingkungan tidak terlepas dari struktur politik-ekonomi, ketergantungan ekonomi pada tambang, serta norma patriarki yang mendefinisikan otoritas pengetahuan dan pengambilan keputusan (*Feminist Political Ecology*). Perspektif ini menegaskan bahwa pengalaman ekologis Perempuan meskipun sering tidak diakui secara formal merupakan basis penting bagi kesadaran kritis dan potensi advokasi lingkungan berbasis keadilan gender.

Berdasarkan integrasi ketiga perspektif tersebut, penelitian ini merumuskan Model Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dalam Tata Kelola Lingkungan Pascatambang yang bersifat bertahap dan kontekstual. Model ini menempatkan dialog komunitas sebagai fondasi pembentukan kesadaran awal; media alternatif sebagai jembatan yang menghubungkan ruang privat dengan ruang publik; penguasaan pengetahuan dan literasi digital sebagai sumber utama *agency* perempuan; serta akses kebijakan sebagai arena transformasi relasi kuasa dalam tata kelola lingkungan.

Model ini menegaskan bahwa komunikasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses pertukaran pesan, melainkan sebagai instrumen strategis pemberdayaan yang menghubungkan pengalaman ekologis perempuan dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan lingkungan. Dengan membuka ruang dialog yang setara, memperkuat literasi media dan pengetahuan, serta menghadirkan mekanisme kebijakan yang responsif gender, komunikasi berpotensi menjadi penggerak utama pemberdayaan perempuan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola lingkungan pascatambang yang inklusif, adil gender, dan berkelanjutan.

Untuk mensintesis temuan penelitian dan kerangka teoretis yang digunakan, penelitian ini merumuskan model komunikasi pemberdayaan perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang. Tabel 3 menyajikan integrasi antara teori, makna temuan lapangan, strategi pemberdayaan, dan implikasinya terhadap tata kelola lingkungan yang komprehensif dan responsif gender.

Tabel 3. Model Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Pascatambang

Kerangka	Temuan Utama	Aktor & Saluran	Proses Pemberdayaan	Output/Indikator
<i>Feminist Political Ecology</i>	Suara perempuan termarginalisasi akibat relasi patriarki dan ketergantungan ekonomi tambang	Perempuan terdampak, komunitas lokal, forum warga	Pengakuan pengalaman ekologis perempuan sebagai pengetahuan sah	Pengalaman perempuan mulai diakui dalam diskusi lingkungan

Komunikasi Dialogis & Partisipatif	Dialog perempuan hadir di komunitas tetapi belum terhubung ke kebijakan	Kelompok perempuan, forum desa, <i>musrenbang</i> , diskusi komunitas	Dialog horizontal dan refleksi kolektif	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam forum publik
<i>Empowerment Theory</i>	Media dan pengetahuan memperkuat <i>agency</i> perempuan	Pelatihan literasi digital, seminar, forum berbasis data	Penguatan kapasitas komunikasi dan advokasi	Keberanian berbicara, akses data, keterlibatan forum meningkat
Media Alternatif	Media komunitas dan media sosial menjadi <i>safe space</i> advokasi	Media sosial warga, kanal advokasi, dokumenter partisipatif	Produksi narasi berbasis pengalaman lokal	Perempuan mampu memproduksi narasi dan memengaruhi wacana publik
Integrasi Model	Dialog → <i>agency</i> → akses kebijakan membentuk pemberdayaan bertahap	Komunitas perempuan, media lokal, pemerintah desa	Transformasi komunikasi menuju advokasi kebijakan	Tata kelola lingkungan lebih inklusif dan partisipatif

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Tabel 3 menggambarkan Model Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dalam Tata Kelola Lingkungan Pascatambang yang disusun berdasarkan integrasi antara temuan lapangan dan kerangka teoretis utama penelitian. Tabel ini menunjukkan bahwa marginalisasi suara perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh relasi patriarki, tetapi juga oleh ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas pertambangan yang membatasi keberanian perempuan dalam menyuarakan aspirasi lingkungan. Melalui perspektif *Feminist Political Ecology*, kondisi tersebut dipahami sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, tabel ini memperlihatkan bahwa komunikasi dialogis antarperempuan sebenarnya telah berlangsung dalam kehidupan komunitas sehari-hari, namun masih terbatas pada ruang informal dan belum terhubung secara optimal dengan proses kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, forum desa, *musrenbang*, komunitas perempuan, serta media lokal dan media sosial komunitas diposisikan sebagai mekanisme jembatan komunikasi yang menghubungkan pengalaman perempuan dengan pengambil keputusan.

Selanjutnya, model ini juga menegaskan bahwa media alternatif, penguasaan pengetahuan, dan literasi digital memiliki peran penting dalam memperluas *agency* perempuan. *Agency* tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya keberanian perempuan untuk berbicara di ruang publik, kemampuan memproduksi narasi lingkungan, akses terhadap data dan pengetahuan, keterlibatan dalam forum partisipatif, serta kemampuan memengaruhi wacana dan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, integrasi dialog komunitas, media alternatif, dan akses kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai instrumen strategis yang mentransformasi perempuan dari objek terdampak menjadi subjek aktif dalam tata kelola lingkungan pascatambang yang lebih inklusif, adil gender, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan suara perempuan dalam tata kelola lingkungan pascatambang bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya partisipasi individu, melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa patriarkis, ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas pertambangan, serta terbatasnya akses perempuan terhadap ruang komunikasi publik, media, dan proses kebijakan lingkungan. Meskipun komunikasi dialogis telah berlangsung kuat di tingkat

komunitas melalui interaksi keseharian antarperempuan, praktik tersebut masih terkurung dalam ruang privat dan belum terhubung secara transformatif dengan proses perencanaan maupun pengambilan keputusan lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Pascatambang yang bersifat bertahap dan kontekstual. Model ini menempatkan dialog komunitas sebagai fondasi pembentukan kesadaran kritis perempuan, media alternatif sebagai jembatan yang menghubungkan ruang privat dengan ruang publik, penguasaan pengetahuan dan literasi digital sebagai sumber utama *agency* perempuan, serta akses kebijakan sebagai arena transformasi relasi kuasa dalam tata kelola lingkungan. Model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses bertahap yang menghubungkan pengalaman ekologis perempuan dengan ruang advokasi, partisipasi publik, dan kebijakan lingkungan. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi pembangunan dan komunikasi lingkungan melalui integrasi komunikasi partisipatif, *empowerment theory*, dan *Feminist Political Ecology* dalam satu kerangka analitis yang saling melengkapi. Temuan penelitian memperluas pemahaman tentang komunikasi tidak hanya sebagai proses pertukaran pesan, tetapi sebagai instrumen strategis pemberdayaan yang mampu mentransformasi perempuan dari objek terdampak menjadi subjek aktif dalam tata kelola lingkungan pascatambang yang inklusif, adil gender, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriski, M., Pradana, N., Maryani, E., & Indriani, S. S. (2025). Strategi Media Alternatif Proyek Multatuli dalam Menjaga. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i1.2963>
- Anastasia. (2019). Sejarah penambangan timah di Bangka Belitung: Dari masa kolonial hingga reformasi. *Jurnal Sejarah Peradaban Bangsa*, 3(2), 145-164.
- Asghar, J. (2013). Critical Paradigm: A Preamble for Novice Researchers. *Life Science Journal*, 10(4), 3121–3127.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Hasna, S. (2025). Aktivisme Digital Warganet Muhammadiyah dalam Menyuarakan Isu Krisis Iklim dan Lingkungan Pada Tagar # Milad111Muhammadiyah. *JURKOM Jurnal Riset Komunikasi*, 8(1), 153–170. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v8i1.1160>
- Indrawasih, R. (2015). Peran produktif perempuan dalam beberapa komunitas nelayan di Indonesia / The productive role of women in several Indonesian fishing communities. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2), 249–264. <https://doi.org/10.14203/jmb.v17i2.286>
- Kabeer, N. (2021). Gender equality, inclusive growth, and labour markets. *Women's Economic Empowerment: Insights from Africa and South Asia*, 13–48. <https://doi.org/10.4324/9781003141938-3>
- Karasová, E. (2023). Mainstream versus alternative media. In *Megatrends and Media* (pp. 48–61). University of Ss. Cyril and Methodius
- Khadijah, S. (2023). Partisipasi politik perempuan dalam kiprah dakwah partai keadilan sejahtera. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.518>
- Kholisoh, N. (2015). Konstruksi peran politik perempuan di media. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 14(4), 310–324. <https://doi.org/10.32509/wacana.v14i4.130>
- Kurniawan, A., Kurniawan, A., Wati, M., Kurniawati, F., & Rivaldy, N. (2024). Identification of vegetation in post-tin mining collectors in Nibung and Riding Panjang villages of Bangka Belitung Islands. *Journal of Aquatropica Asia*, 9(1), 28–33. <https://doi.org/10.33019/joaa.v9i1.4586>
- Kurniawati, D. K. (2022). Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(2), 77–89.

- <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>
- Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2019). Digital feminist activism: Girls and women fight back against rape culture. *New Media & Society*, 21(6), 1290–1307. <https://doi.org/10.1177/1461444818823710>
- Mongabay.co.id. (2022). *Suara Perempuan Masih Terabaikan dalam Proyek Pembangunan*. <https://www.mongabay.co.id/2022/04/28/suara-perempuan-masih-terabaikan-dalam-proyek-pembangunan/#:~:text=Ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup>
- Odoom, Sagoe, C. ., & Obeng-Baah, O. . & J. (2024). Participatory communication in the provision of development services in the Ghanaian decentralised government system: evidence from the Central Region.5, 266 (2024). *Discov Sustain*, 5(266). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43621-024-00336-w>
- Parahita, G. D. (2021). Feminist activism on social media in Indonesia: Negotiating voice, safety, and solidarity. *Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1875211>
- Paramaditha, I., & Riyanto, B. (2020). Digital feminism and the politics of voice in Indonesia. *Feminist Media Studies*. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1713841>
- Puji Laksono, & Laila Aisya Zakiyah. (2023). Gender Sensitive Journalism; The Role of Magdalene Online Media in Campaigning for Gender Issues. *Mediakita*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i2.1041>
- Putri, A. F. J., Valensia, M. V., Purnama, R., & Manik, J. D. N. (2023). Dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya akibat pertambangan timah ilegal di Kecamatan Mentok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4473–4481. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>
- Resurrección, B. P. (2017). Gender and environment: A feminist political ecology perspective. *Gender, Place & Culture*, 24(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2016.1237620>
- Riyyanatasya, Y. W. (2023). Analisis Model Normative Demokrasi Strömbäck Pada Praktik Jurnalisme Media Alternatif “Watchdoc Documentary.” *JCommsci - Journal of Media and Communication Science*, 6(2), 20–28. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v6i2.213>
- Rizal, M. R. P., & Bahri, S. (2024). Media Sebagai Kekuatan Politik: Studi Kasus Project Multatuli Sebagai Perlawanan Media Pers Alternatif Terhadap Oligarki di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 102–120. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11210>
- Sholihah, H. A., Yumna, A. N. A., & Isnaini, S. N. (2024). Kajian Ekofeminisme: Studi Kasus Komunitas Perempuan Peduli Leuser. *Egalita Jurnal Kesenjangan Dan Keadilan Gender*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.23806>
- Sholihah, R., Pramono, A., & Nugroho, Y. (2024). Ecofeminism and digital environmental activism in Indonesia. *Environmental Communication*. <https://doi.org/10.1080/17524032.2024>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suzina, A. ., Tufte, T., & Martínez, C. . (2020). Special issue: The legacy of Paulo Freire. Contemporary reflections on participatory communication and civil society development in Brazil and beyond. *International Communication Gazette*, 82(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1748048520943687>
- Tufte, T. (2020). De-constructing participatory communication for social change: A Freirean critique. *Communication Theory*, 30(2), 173–191. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa003>
- Ty, P. H. (2023). A feminist political ecology view from Vietnam. *World Development Perspectives*, 31. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100522>
- Wahid, A. (2024). Mereka Kerdil : Diskursus Elite Politik di Media Alternatif. *TUTURLOGI: Journal of Southeast Asian Communication*, 5(3), 156–169. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.03.5>
- Walhi.or.id. (2024). *Walhi Kepulauan Bangka Belitung: Pengabaian Atas Pemulihan Ekologis Bentuk Delusi Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Timah 300 Triliun*.

<https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-pengabaian-atas-pemulihan-ekologis-bentuk-delusi-negara-dalam-penyelesaian-kasus-korupsi-timah-300-triliun>